ISU STRATEGIS — BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH

CASCADING

Kepala Daerah

MISI	III. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
	IV. MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN RESPONSIF
Tujuan RPJMD	MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN KONDISI LINGKUNGAN
	TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN PROFESIONAL
Sasaran RPJMD	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Eselon II)

Tujuan OPD	MENINGKATNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN PARTISIPATIF 1. Indeks PEMDI 2. Indeks SPBE
Sasaran OPD	MENINGKATNYA LAYANAN BERBASIS TEKBOLOGI INFORMASI Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Digital
	TERWUJUDNYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA MUDAH DI AKSES DAN FAKTUAL Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Kepala Bidang (Eselon III)

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SASARAN	Terselenggaranya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya Tata Kelola Keamanan Informasi yang Sesuai dengan Kebijakan Nasional dan Standar SEDA	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, dan Terstandar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Meniliai Kinerja Pemerintah Terhadap Keterbukaan Informasi
INDIKATOR	Persentase Aplikasi Yang Aktif dan Terkelola Sesuai Ketentuan SPBE Dari Total Aplikasi Yang Di Miliki	INDEKS KAMI (SKOR)	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)	IKM terhadap penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kepala Sub Bidang (Eselon IV / Jafung)

KEGIATAN	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN	Terpenuhinya Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Daerah	Terbangunnya Sistem Komunikasi Pemerintahan yang Aman dan Terkendali	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terstandar, dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik
INDIKATOR	Persentase Aplikasi Khusus Daerah Yang Di bangun dan Di kembangkan	Persentase Dokumen atau Data Penting Pemerintah Daerah Yang Di Eskripsi	Persentase Data Sektoral Yang di kumpulkan	Persentase Pengelolaan Media Informasi Dan Komunikasi Publik yang aktif terkelola

PELAKSANA

SUB KEGIATAN	**1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah**	**1. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral**	**1. Relasi Media**
SASARAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi, efisien, dan andal melalui pemanfaatan jaringan intra yang aman	Meningkatnya keamanan, keandalan, dan kepercayaan terhadap tata kelola informasi pemerintah daerah melalui kebijakan keamanan informasi dan persandian	Meningkatnya kualitas perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah melalui penyediaan statistik sektoral yang valid, terpadu, dan akuntabe	Terciptanya Hubungan Yang Baik Dalam Membangun Cita Positif, Peningkatan Reputasi Serta Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah
INDIKATOR	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Disusun (Meliputi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur/Instruksi Gubernur, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan sebagai pencapaian dalam mendukung penyelenggaraan persandian	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
	2. Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi	**2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah**	**2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia**	**2. Rentrasan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat**
	Meningkatnya integrasi dan kualitas pelayanan publik digital pemerintah daerah melalui pemanfaatan portal pelayanan terintegrasi	Meningkatnya keandalan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian yang aman, terpadu, dan terpercaya	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia yang terpadu, valid, dan akuntabel	Peningkatan Akses Dalam Penyebaran Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Untuk Bisa Diterima Dengan Mudah
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo			**3. Pelayanan Informasi Publik**
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			Jumlah permohonan informasi Publik yang direalisasikan sesuai peraturan perundangan
	4. koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE			**4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik**
	Meningkatnya integrasi, efisiensi, dan kualitas layanan pemerintahan daerah melalui pembangunan aplikasi khusus yang sesuai arsitektur SPBE dan pemanfaatan aplikasi umum SPBE			memastikan kebijakan yang dibuat dan diterapkan relevan, efektif dan akuntabel
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan aturan/aktif tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
	5. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah			**5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik**
	Meningkatnya efektivitas, integrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan pusat kendali			Meningkatnya jangkauan dan Keterlibatan Publik terhadap Informasi Pemerintah
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/jumlah
	6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Interoperabilitas Data Dan Integrasi Layanan			**6. Penyusunan Konten**
	Meningkatnya integrasi dan kualitas layanan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan sistem penghubung layanan untuk interoperabilitas data dan layanan			Tersedianya Konten Informasi Pemerintah yang Informatif, Menarik, dan Mudah Dipahami
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			Jumlah Konten Informasi Publik
	7. Penyediaan Akses Internet			**7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik**
	Meningkatnya keterhubungan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan dan informasi publik			Terciptanya SDM yang Responsif terhadap isu dan Dinamika Publik
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
	8. Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Dan Kota Cerdas			
	Meningkatnya efektivitas, integrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan pusat kendali			
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas			
	9. Koordinasi Pengelolaan Data Dan Informasi			
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik melalui pengelolaan data dan informasi yang terpadu, valid, dan akuntabel.			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah			